

Implementation of the Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) Health Protocol in the Tourism Industry in Balige City, Toba Regency

Rahmat Darmawan¹

¹Politeknik Pariwisata Medan

Correspondence : Rahmat Darmawan, Politeknik Pariwisata Medan

Email : rahmatdarmawan@poltekparmedan.ac.id

Abstract

The application of the CHSE health protocol (Prokes) in tourist destinations should be investigated in an effort to ensure the tourism industries in Balige City and its surroundings are ready to accept tourist visits during a pandemic or new normal. The purpose of this study is to explore the application of the CHSE program to the tourism industry as an effort to build tourist trust to visit and settle in Toba Regency. This research is entitled to examine the application of the CHSE program in the tourism industry including hotels, restaurants/cafe/canteens, souvenir shops and tourist attractions. This study uses a qualitative design with qualitative descriptive data analysis. The data grouping was carried out using the ethnographic method of the Spradley Model (1980). The informants taken are key informants including tourism industry managers/tourists and tourists as the main informants.

Based on the analysis of the problem with a qualitative approach, several conclusions can be drawn as follows. First, the realization of the implementation of the CHSE process was concluded to be poor, especially the realization in tourist objects, / restaurants / restaurants managed by amateurs / local communities. Nevertheless, the realization of the implementation of the CHSE process looks optimal in the tourism industry which is managed professionally/management. Furthermore, it was concluded that the response of tourists to the condition of the health program and the implementation of the CHSE program was not good, especially in the tourism industry which was managed by the local community.

Keywords: application, health protocol, CHSE, tourism industry, Toba Regency

Penerapan Protokol Kesehatan Cleanliness, Health, Safety, And Environmental Sustainability (CHSE) Pada Industri Pariwisata Di Kota Balige, Kabupaten Toba

ABSTRAK

Penerapan protokol kesehatan (Prokes) CHSE pada destinasi wisata seyognya diteliti dalam upaya memastikan industri pariwisata di Kota Balige dan sekitarnya siap menerima kunjungan wisatawan pada masa pandemi atau kebiasaan baru (new normal). Tujuan penelitian ini adalah ingin mengeksplorasi penerapan prokes CHSE pada industri pariwisata sebagai upaya dalam membangun kepercayaan wisatawan untuk berkunjung dan menetap di Kabupaten Toba. Penelitian ini bertajuk menelaah penerapan prokes CHSE pada industri pariwisata meliputi hotel, restoran/café /kantin, toko *souvenir* dan objek wisata. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan analisis data deskriptif kualitatif. Pengelompokan data dilakukan dengan metode etnografi Model Spradley (1980). Informan yang diambil adalah informan kunci meliputi pengelola industri pariwisata/pelaku wisata dan wisatawan sebagai

informan utama. Berdasarkan analisis permasalahan dengan pendekatan kualitatif dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut. Pertama, realisasi penerapan prokes CHSE disimpulkan kurang baik khususnya realisasi pada objek wisata, /restoran/rumah makan yang dikelola secara amatir/masyarakat lokal. Meskipun demikian, realisasi penerapan prokes CHSE terlihat optimal pada industri pariwisata yang dikelola secara profesional/manajemen. Selanjutnya, disimpulkan bahwa tanggapan wisatawan terhadap kondisi prokes dan pelaksanaan prokes CHSE kurang baik khususnya pada industri pariwisata yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Kata kunci: *penerapan, protokol kesehatan, CHSE, industri pariwisata, Kabupaten Toba*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dianggap sudah berangsur membaik, ternyata pandemi covid 19 belakangan menunjukkan kecenderungan peningkatan status penularan yang relatif tinggi. Malah, saat ini virus corona bermutasi menjadi lebih gampang tertular dan lebih ganas. Saat ini sudah terdapat 16 kasus covid-19 di Indonesia yang disebabkan oleh penularan mutasi baru yang berasal dari Inggris, India, dan Afrika Selatan (<https://nasional.kompas.com.>, 2021). Hal ini memperparah kasus penularan covid-19 yang selama ini. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin bahwa 16 kasus penularan dari mutasi-mutasi tersebut masuk sebagai kategori *varian of concern* atau mutasi yang memang sangat diperhatikan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) (<https://nasional.kompas.com.>, 2021). Pandemi covid-19 membuat dunia khususnya Indonesia semakin terpuruk.

Indonesia mengalami keterpurukan hampir pada seluruh industri kecuali bidang kesehatan, farmasi, kegiatan sosial, informasi dan komunikasi, pengadaan air bersih, pengelolaan sampah, serta limbah daur ulang. Sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata yang meliputi yaitu penyediaan perhotelan dan akomodasi serta makan, transportasi, travel, dan ekspedisi. Pada sektor pariwisata, destinasi wisata yang paling

terdampak adalah Bali, Jogjakarta, dan daerah lainnya termasuk juga destinasi wisata Danau Toba.

Danau Toba telah diputuskan oleh Pemerintah menjadi sebuah Destinasi Super Prioritas (DSP) dan selanjutnya penamaan kawasan Danau Toba adalah Destinasi Super Prioritas Danau Toba atau **DSP Danau Toba (DSPDT)**. Kawasan ini tentu saja menempati prioritas utama dalam pembangunan kepariwisataan. Terdapat delapan kabupaten yang mengelilingi DSPDT, baik dari lingkaran luar maupun dalam. Salah satu di antaranya adalah Kota Balige di Kabupaten Toba. Kota Balige adalah salah satu daerah yang menjadi *key tourism area* dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata. Selain itu terdapat juga kawasan pengembangan kunci yakni Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Simanindo yang keduanya berada di Kabupaten Samosir. Lebih lanjut, hampir semua kawasan di sekitar DSPDT mendapatkan perhatian untuk dikembangkan. Prioritas pengembangan saat ini adalah atraksi, aksesibilitas, dan amenities. Perbaikan sarana dan prasarana jalan, jembatan, drainase, listrik, dan lain sebagainya juga gencar diperbaiki dan ditambah secara konsisten. Melalui Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) semua program ini dikelola dan dikordinir. Tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui aktifitas kepariwisataan.

Tidak satu orang pun di dunia ini yang pernah membayangkan wabah virus corona menyebar secara *massive* dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan di semua sektor. Sektor yang paling terdampak adalah pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019 sebesar 4,80 persen atau meningkat 0,30 poin dari tahun sebelumnya. Dengan terjadinya pandemi COVID-19 semenjak awal tahun 2020 ini, sangat mempengaruhi rantai pasok pariwisata dalam negeri. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terkena dampak parah akibat penyebaran virus corona (BPKN, 2020). Ditambah lagi dengan langkah pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah membuat aktivitas pariwisata menjadi lumpuh.

Lebih lanjut, Pemerintah telah melakukan tiga tahapan dalam penanganan covid-19 yaitu, tanggap darurat, pemulihan dan normalisasi. Dalam pelaksanaan tanggap darurat, industri pariwisata telah merasakan pukulan pandemi covid-19 sebelum pemerintah menerapkan PSBB pada 1 April lalu. Melalui PP Nomor 21 Tahun 2020, kondisi pada tahapan pemulihan, menurut data Kemenparekraf yang diterima *Katadata.co.id* pada 7 April 2020, sebanyak 10.946 usaha pariwisata telah terdampak dan 30.421 tenaga kerja wisata kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, pada kondisi tanggap darurat, BPS mencatat, tingkat hunian hotel berbintang pada Mei 2020 sebesar 14,45%, jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 43,53%. Sementara PHRI mencatat 2.000 hotel dan 8.000 restoran berhenti beroperasi selama masa PSBB (BPKN, 2020).

Saat pandemi covid-19 menghantam sejak Maret 2020, Traveloka mencatat penurunan kedatangan wisatawan

mancanegara ke Indonesia sekitar 65 persen yang berdampak kepada penutupan setidaknya 2000-an hotel dan lebih dari 8000 restoran. Sementara itu, *platform pegipegi* juga mengalami keterpurukan namun mereka mencatat mulai ada pemulihan sekitar 60 persen di akhir tahun 2020. Tercatat penurunan pendapatan sektor pariwisata sekitar Rp 59,1 triliun sampai Rp 86 triliun. Khusus di platform pemesanan tiket pesawat dan hotel Traveloka, terjadi jumlah penurunan pengguna hingga 70 persen. Permintaan pengembalian dana pun melonjak hingga ribuan per menitnya (<https://www.antaraneews.com>, 30 Januari 2021 diakses pada tanggal 5 Mei 2021).

Pada awal perkembangan virus semua kegiatan pariwisata di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini dikarenakan larangan bepergian bagi masyarakat Indonesia dan kembalinya wisatawan asing ke negara asalnya akibat larangan ini. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah wisman yang mengunjungi Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 12,10 juta kunjungan. Sedangkan pada tahun 2020 menurut data BPS jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia hanya berjumlah 3,56 juta kunjungan dimana terjadi penurunan jumlah wisatawan sebanyak 70,57% (Periode Januari – September). Selain larangan bepergian yang dikeluarkan oleh Pemerintah, imbauan penutupan lokasi wisata juga menjadi salah satu faktor menurunnya jumlah kunjungan wisata, dan hal ini sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat, terutama masyarakat yang tergantung dengan kegiatan pariwisata di daerahnya, dan hal ini mengakibatkan banyak industri pariwisata mengalami kebangkrutan.

Panduan protokol CHSE sudah melalui tahapan-tahapan sosialisasi/desiminasi, pelatihan, sertifikasi dan pelabelan dan lain sebagainya.

Sosialisasi dan pelatihan CHSE dilaksanakan pada semua destinasi super prioritas, termasuk juga di DSPDT. Kegiatan-kegiatan CHSE Juga dilaksanakan di Kota Balige sebagai Ibukota Kabupaten Toba (sebelumnya disebut Tobasa).

Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) yang menjadi salah satu dari delapan kabupaten yang mengitari Danau Toba telah berganti nama menjadi Kabupaten Toba. Pergantian nama berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020. Kota Balige adalah Ibukota dari Kabupaten Toba yang dapat ditempuh hanya sekitar 20 menit dari Bandara Silangit atau 1,5 jam dari Parapat. Kota ini merupakan lokasi Karnaval Pesta Kemerdekaan pada tahun 2016 lalu. Di kota ini Anda akan menemukan berbagai lokasi yang sangat cocok untuk bersantai, merasakan ketenangan dan juga kenyamanan dari berbagai kesibukan dan rutinitas setiap hari. Balige memiliki luas wilayah 91.05 km² atau 4,50% dari total luas Kabupaten Toba dengan kepadatan penduduk 418,32 jiwa/km². Kota Balige berada pada titik koordinat 2°15' - 2°21' Lintang Utara dan 99°00' – 99°11' Bujur Timur. Sedangkan untuk topografinya berada sekitar 905 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kota Balige adalah: Utara berbatasan langsung dengan Danau Toba; Timur : Kecamatan Laguboti; Selatan : Kabupaten Tapanuli Utara; dan Barat : Kecamatan Tampahan.

Kota Balige terletak sekira 250 kilometer dari ibu kota provinsi Sumatera Utara. Kota Balige merupakan ibu kota kabupaten Toba yang memiliki luas 91 kilometer persegi. Kota ini bisa dicapai melalui 2 bandara di Sumatera Utara yaitu bandara Kualanamu dengan waktu tempuh 6-7 jam perjalanan dan bandara Silangit dengan waktu tempuh 30-60 menit. Di ibukota kabupaten Toba ini, terdapat beberapa perbukitan yang biasa didatangi untuk menikmati indahnya Danau Toba.

Kota Balige inilah yang erat memiliki jejak sejarah kerajaan Batak Kuno dinasti Bakkara (Indonesia.go.id., 2021)

Gambar Peta Kecamatan Balige, Kabupaten Toba



Sumber: <https://commons.wikimedia.org>

Penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (Clean, Health, Safety & Environmental Sustainability) menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pemulihan pariwisata di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga mereda. Tanpa pelaksanaan protokol kesehatan dan disiplin tinggi, tidak mudah bagi sektor pariwisata untuk dapat bangkit kembali. Untuk itu, Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif (Kememparekraf) menerbitkan buku panduan khusus terkait protokol kesehatan berbasis CHSE bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE pada destinasi wisata sangat penting untuk membangkitkan dan meningkatkan kepercayaan wisatawan serta mendorong wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata. Protokol CHSE ini ditujukan bagi semua pihak, mulai dari pengelola, pemilik, asosiasi, karyawan atau pemandu wisata, tamu atau pengunjung, kelompok masyarakat hingga pemerintah daerah.

Berdasarkan survei dan observasi terhadap penerapan protokol covid 19 CHSE pada beberapa industri pariwisata di

Kota Balige, nampaknya terdapat fenomena kecenderungan adanya beberapa kelompok masyarakat atau pelaku wisata yang menerapkan protokol kesehatan pada industri pariwisatanya. Secara umum terdapat dua: 1) kelompok masyarakat/pelaku wisata yang betul-betul menerapkan protokol kesehatan; dan 2) kelompok masyarakat yang tidak/kurang menerapkan protokol kesehatan.

Fenomena kurangnya kesadaran kelompok masyarakat/pelaku wisata dalam menerapkan protokol kesehatan melalui CHSE kepada para wisatawan. Hal ini terutama terlihat pada industri pariwisata yang dikelola oleh penduduk lokal, misalnya pada destinasi wisata Pantai Bul-Bul, Balige. Namun demikian terdapat juga industri pariwisata yang tetap menjalankan prosedur protokol kesehatan CHSE dengan konsisten, misalnya pada industri perhotelan dan restoran yang dikelola oleh profesional. Industri semacam ini biasanya dikelola oleh manajemen yang profesional. Pertanyaan adalah apakah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi covid 19 tergantung dari tingkat literasi dan pendidikan masyarakat? Bagaimanakah kesadaran masyarakat terbentuk sedemikian rupa sehingga munculnya persepsi ketidakpercayaan terhadap terjadinya pandemik covid 19?

Pada awal terjadinya pandemi covid 19 yang melanda Indonesia sekitar awal Maret 2020, semua pelaku wisata dan pemangku kepentingan (stakeholder) gencar sekali mengkampanyekan penerapan CHSE pada objek wisata. Namun, seiring dengan berjalannya waktu hingga saat ini, nampaknya kesadaran masyarakat, pelaku wisata, dan *stakeholder* melemah dalam menerapkan protokol kesehatan covid 19. Menurut penulis, melemahnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan covid 19 juga menjadi salah satu faktor yang turut mengambil andil dalam proses menerapkan

CHSE di Kota Balige. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan calon wisatawan untuk mengunjungi apalagi tinggal dan menetap pada industri pariwisata dan/atau objek-objek wisata di Kota Balige dan sekitarnya. Oleh karena itu, fenomena seperti ini layak untuk ditelaah lebih lanjut mengingat urgensinya terhadap peningkatan sektor pariwisata demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan kepada dua permasalahan utama: 1) bagaimanakah panduan penerapan CHSE diimplementasikan pada industri pariwisata di Kota Balige?; dan 2) bagaimanakah tanggapan wisatawan terhadap penerapan CHSE pada industri pariwisata di Kota Balige? Kajian semacam ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pendekatan etnografi, yakni melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara (Spradley, 1980)

Metode kualitatif Model Spradley (1980) dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan tiga analisis data, yakni 1) analisis domain, 2) analisis taksonomi, dan 3) analisis komponensial. Ke tiga analisis data tersebut sangat efektif dalam pengkategorisasian data untuk ditelaah lebih lanjut. Pertama, penggunaan Buku Panduan CHSE, prosedur penerapan Buku Panduan CHSE. Selanjutnya, tanggapan wisatawan terhadap prosedur kesehatan covid 19 disandingkan dengan konsep pengelolaan wisata **Sapta Pesona** (Depparpostel, 1991) dan **4ASC**: atraksi, amenitas, aksesibilitas, *ancillary*, *safeness* dan *comfort* (Sibarani, 2018). Hasil temuan penelitian adalah rekomendasi penerapan CHSE Secara optimal di Kota Balige dalam upaya meraih kepercayaan calon wisatawan yang hendak berkunjung. Penelitian ini juga akan memperkaya telaah penguatan objek-objek wisata dalam menyambut wisatawan pada masa pandemi covid 19.

KERANGKA KONSEP

Pengertian Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

Pengertian pengaruh menurut beberapa ahli yaitu:

1. Menurut Wiryanto, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi.
2. Menurut M. Suyanto, pengaruh adalah nilai kualitas suatu iklan melalui media tertentu.
3. Menurut Uwe Becker, pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang dan tidak terlalu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan.
4. Menurut Norman Barry, pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan agar bertindak dengan cara tertentu, terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya.
5. Menurut Robert Dahl, pengaruh diumpamakan sebagai berikut: A mempunyai pengaruh atas B sejauh ia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan.
6. Menurut Sosiologi Pedesaan, pengaruh adalah kekuasaan yang bisa mengakibatkan perubahan perilaku orang atau kelompok lain.
7. Menurut Bartram Johannes Otto Schrieke, pengaruh adalah bentuk dari suatu kekuasaan yang tidak dapat diukur kepastiannya.
8. Menurut Albert R. Roberts dan Gilbert, pengaruh adalah wajah kekuasaan yang diperoleh oleh orang saat tidak memiliki

kewenangan untuk mengambil keputusan.

9. Menurut Jhon Miller, pengaruh adalah komoditi berharga dalam dunia politik Indonesia.

Dapat dilihat bahwa dari beberapa arti pengaruh menurut para ahli maka saya berpendapat atau diartikan aktifitas manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dilihat tetapi bisa dirasakan kegunaannya dalam kehidupan.

Definisi Rumah Makan

Menurut Mukono (2004) Rumah makan yaitu usaha komersial jasa pelayanan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya dan bentuk usahanya ada yang berupa depot, kantin, dan kafetaria. Rumah makan adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa makan maupun minum. Rumah makan ada yang berada dalam satu hotel, kantor maupun pabrik, dan banyak juga yang berdiri sendiri diluar bangunan itu. Tujuan operasi rumah makan adalah untuk bisnis atau mencari uang, membuat puas para tamu pun merupakan tujuan operasi rumah makan yang utama (Marsum, 2005). Usaha rumah makan adalah tempat usaha yang komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan pelayanan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya. Usaha rumah makan merupakan suatu tempat seseorang yang datang menjadi tamu yang akan mendapatkan pelayanan untuk menikmati makanan, baik pagi, siang ataupun malam sesuai dengan jam bukanya dan oleh tamu yang menikmati hidangan itu harus membayar sesuai dengan harga yang ditentukan sesuai daftar yang disediakan di rumah makan itu. Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rumah makan adalah tempat usaha yang melayani tamu yang datang dengan ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman yang bersifat komersial (Indah,

2012).

Restribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Windhu (2018: 185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017: 108) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Marihat (2016: 616) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut Windhu (2018: 186-191) retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1) Restribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan

pengabuan mayat

- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f. Retribusi pelayanan pasar
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - j. Retribusi penyediaan atau penyedot kakus
 - k. Retribusi pengolahan limbah cair
 - l. Retribusi pelayanan tera ulang
 - m. Retribusi pelayanan pendidikan
 - n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
 - o. Retribusi pengendalian lalu lintas
- 2) Restribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- Jenis retribusi jasa usaha adalah:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan
 - c. Retribusi tempat pelelangan
 - d. Retribusi terminal
 - e. Retribusi tempat khusus parkir
 - f. Retribusi tempat penginapan atau pesanggarahan/villa
 - g. Retribusi rumah potong hewan
 - h. Retribusi pelayanan kepelabuhan
 - i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - j. Retribusi penyeberangan di air
 - k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- 3) Restribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada

orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan serta kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi izin usaha perikanan
- f. Retribusi perpanjangan izin

Ciri-ciri Restribusi Daerah

Menurut Windhu (2018: 186) terdapat ciri-ciri retribusi daerah sebagai berikut:

- 1) Dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan.
- 3) Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- 4) Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- 5) Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.

Penetapan Jenis Retribusi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 149 ayat 2-4, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

Hal yang sama juga berlaku untuk

penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan sesuai dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing.

Bukan Objek Retribusi Daerah

Menurut Marihot (2016: 621-622) jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara langsung. Apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah, tetapi tidak secara langsung, misalnya BUMD, jasa tersebut tidak dikenakan retribusi. Sesuai undang-undang nomor 18 tahun 1997 pasal 19, jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek retribusi. Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu BUMD tidak merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh daerah, tetapi dalam melakanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari pemerintah daerah. Jasa yang diberikan oleh BUMD bukanlah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Apabila BUMD memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, BUMD wajib membayar retribusi daerah.

Retribusi Lain-Lain

Menurut Marihot (2016: 636-638) pemungutan retribusi daerah pemerintah daerah memungut jenis retribusi daerah selain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang ditetapkan didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 110 ayat 1, pasal 127, dan pasal 141.

Wisatawan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa wisatawan adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Menurut Soekadijo (2000) (dalam Purwanti dan Dewi 2014), wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap ditempat yang didatanginya, atau hanya untuk sementara waktu tinggal ditempat yang didatanginya.

Tujuan wisata untuk melakukan perjalanan wisata ada beberapa macam, salah satunya untuk bersenang-senang di daerah tujuan wisata tertentu. Berikut ini merupakan jenis-jenis dan karakteristik wisatawan:

1. Wisatawan lokal (local tourist),
2. Wisatawan mancanegara (international tourist),
3. Holiday tourist
4. Business tourist
5. Common interest tourist
6. Individual tourist
7. Group tourist

Ada dua faktor yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan menurut Hidayat (2011) yaitu :

1. Aspek Penawaran Pariwisata, ada empat aspek (4A) yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah Attraction (daya tarik), Accesable (transportasi), Amenities (fasilitas) dan Ancillary (kelembagaan). Sementara Smith, 1988 (dalam Pitana, 2005) mengklasifikasikan berbagai barang dan jasa yang harus disediakan oleh daerah tujuan wisata menjadi enam kelompok besar, yaitu: (1) Transportation, (2) Travel services, (3) Accommodation, (4) Food services, (5) Activities and attractions (recreation culture/entertainment), dan (6) Retail goods.
2. Aspek Permintaan Pariwisata, Permintaan pariwisata berpengaruh terhadap semua sektor perekonomian,

baik perorangan (individu), Usaha Kecil Menengah, perusahaan swasta, dan sektor pemerintah (Sinclair dan Stabler, 1997). Menurut Medlik, 1980 (dalam Ariyanto, 2005), faktor-faktor utama dan faktor lain yang mempengaruhi permintaan pariwisata adalah harga, pendapatan, sosial budaya, sosial politik, dan harga barang substitusi

Wisatawan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah wisatawan lokal dan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Utara. Semakin tinggi arus kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tapanuli Utara, maka pendapatan sektor pariwisata juga akan semakin tinggi.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber keuangan daerah, pada hakekatnya menempati posisi yang paling strategis bila dibandingkan dengan sumber keuangan lainnya.

Dikatakan menempati posisi yang paling strategis, karena dari sumber keuangan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah inilah yang dapat membuat daerah memiliki keleluasan yang lebih besar dan didasarkan kreatifitas masing- masing daerah untuk semaksimal mungkin memperoleh sumber pendapatannya sendiri berdasarkan yang ada padanya, selain itu secara bebas juga dapat digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah yang telah menjadi tugas pokoknya (Nasution, 2009:123).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 283 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan Pemerintahan. Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), sebagaimana disebutkan dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 285 mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan menyebutkan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah.

Menurut Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Pajak-pajak daerah antara lain berasal dari penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, reklame, dan golongan c

b. Retribusi Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah yaitu balas jasa pada pajak bersifat tidak langsung sedangkan pada retribusi bersifat langsung dan nyata kepada individu tersebut.

Retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009, yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perijinan Tertentu
- d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi.

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti :

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
- b. Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito,
- c. Potongan dan Selisih Nilai Tukar,
- d. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
- e. Dana perimbangan, dan
- f. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002).

Pendapatan Pariwisata

Semenjak pemberlakuan Otonomi Daerah di Indonesia yang sudah dimulai secara efektif sejak 1 Januari 2001, Pemerintah daerah bukan lagi berperan sebagai “operator” pembangunan, namun juga berfungsi sebagai inisiator, motivator, planner, controller, supervisor, dan fund raising pembangunan termasuk di sektor kepariwisataan.

Pendapatan pariwisata adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari kegiatan kepariwisataan, seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga,

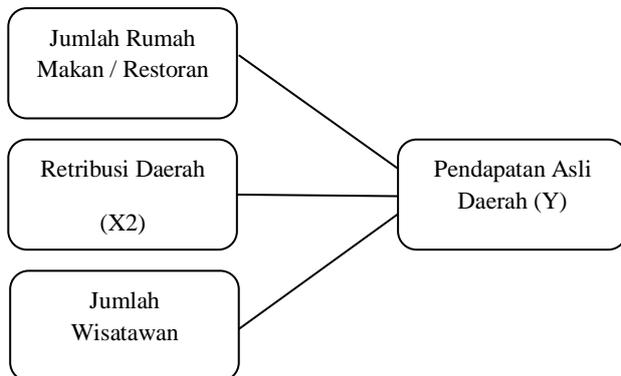
pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan lainnya dengan satuan rupiah pertahun (Yoeti, 1996).

Yang termasuk dalam pendapatan pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh melalui:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Retribusi Kios
5. Retribusi Kamar Kecil
6. Retribusi Iklan
7. Karcis Masuk Obyek Wisata
8. Retribusi Parkir Obyek Wisata
9. Pajak Pembangunan
10. Penerimaan dari Dinas Pariwisata Setempat

Kerangka Konsep

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dibuat kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya.



Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang selanjutnya diuji kebenarannya sesuai dengan model dan analisis yang cocok. Hipotesis penelitian dirumuskan atas dasar latar belakang masalah dan landasan teori maka hipotesisnya adalah :

1. Pengaruh Jumlah Jumlah Rumah Makan/Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ima pangesti (2019), menemukan bahwa jumlah Rumah Makan/Restoran

tidak pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melihat hasil penelitian di atas, maka hipotesis pertama diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 = Diduga Jumlah rumah makan/restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Pengaruh Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Tapanuli Utara.

Retribusi adalah iuran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagai mana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah semestinya diperhatikan daerah disamping sumber-sumber yang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Putriani (2016), menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut berarti Retribusi daerah tidak signifikan tetapi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Melihat hasil penelitian dan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 = Diduga Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan tetapi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara.

3. Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Penerimaan retribusi dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke tapanuli utara berdampak bertambahnya manfaat melalui retribusi pajak yang diestorkan kepada pemerintahan setempat.

Pengaruh langsung kunjungan wisatawan terhadap pendapatan dan

perekonomian daerah. Kelangsungan sumber pendapatan disuatu daerah tersebut ditandai dengan para wisatawan menginap lebih lama pada setiap kunjungannya ke Kabupaten Tapanuli utara. Para wisatawan yang baik yang menginap maupun tidak menginap menjadi sumber penghasilan bagi pemerintah daerah (PAD), pengusaha yang bergerak dibidang pariwisata dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan (Nawawi, 2003). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pertiwi (2014), Nur Indah Kurnia Sari (2015), I Ketut Suidiana (2016) menemukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan memberikan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melihat hasil penelitian di atas, maka hipotesis pertama diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 = Diduga Jumlah Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara.

4. Pengaruh Jumlah Rumah Makan/Restoran, Retribusi Daerah dan Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

H4 = Diduga Jumlah Rumah Makan/Restoran, Retribusi Daerah dan Jumlah Wisatawan berpengaruh secara bersama-sama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

METODOLOGI

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Tempat wilayah penelitian adalah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melalui analisis data dengan menggunakan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2011).

Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2006:129). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data *time series*, dengan periode pengamatan tahun 2015-2020. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, studi pustaka, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dalam penelitian ini.

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data peneliti yang diperoleh dari terbitan atau laporan suatu lembaga terkait. Data yang digunakan antara lain:

1. Jumlah rumah makan/restoran di kabupaten Tapanuli Utara yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kantor Dinas Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun 2015 sampai dengan 2020
2. Jumlah retribusi daerah pada kabupaten Tapanuli Utara yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan BKAD di Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun 2015 sampai dengan 2020
3. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Tapanuli Utara yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kantor Dinas Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun 2015 sampai dengan 2020
4. Pendapatan Asli daerah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan BKAD Kabupaten Tapanuli Utara.

Adapun data sekunder yang akan diteliti oleh peneliti berasal dari data yang telah tersedia dan telah diolah melalui BKAD,

Badan Pusat Statistik, Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara dari

tahun 2015 sampai dengan 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara terletak di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara berada pada ketinggian antara 150-1.700 meter di atas permukaan laut. Secara astronomis Kabupaten Tapanuli utara berada pada posisi 10 20' – 2 0 41' Lintang Utara dan 98 05"–99 16" Bujur Timur dan luas wilayah daratan Kabupaten Tapanuli Utara sekitar 3.793,71 km² dan luas perairan Danau Toba 6,60 km². Secara geografis letak Kabupaten Tapanuli Utara diapit atau berbatasan langsung dengan lima kabupaten yaitu, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah. Selain dari pada itu kabupaten tapanuli utara terdiri dari 15 kecamatan, yaitu: Parmonangan, Adiankoting, Sipoholon, Tarutung, Siatas Barita, Pahae Julu, Pahae Jae, Purbatua, Simangumban, Pangaribuan, Garoga, Sipahutar, Siborongborong, Pagaran dan Muara dan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Tapanuli Utara adalah Kecamatan Garoga sekitar 567,58 km² atau 14,96 persen dari luas Kabupaten, dan kecamatan yang terkecil luasnya yaitu Kecamatan Muara sekitar 5 79,75 km² atau 2,10 persen. 79,75 km² or 2,10 percent. Salah satu unsur cuaca / iklim adalah curah hujan. Kabupaten Tapanuli Utara yang berada pada rata-rata ketinggian 900 meter di atas permukaan laut sangat berpeluang memperoleh curah hujan yang banyak.

Selama tahun 2018, rata-rata curah hujan di Kabupaten Tapanuli Utara yaitu sebesar 219,76 mm dengan rata-rata lama hari hujan bulanan sebanyak 14,52 hari. Dari data curah hujan bulanan tahun 2018, terlihat curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli 2018 dengan jumlah curah hujan bulanan sebesar 54,36 mm. sumber : Kabupaten Tapanuli Utara dalam Angka, 2019; BPS

Tabel Tabel data sampel penelitian

Tahun	Jumlah Rumah Makan / Restoran / Café	Retribusi Daerah	Jumlah Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	Pendapatan Asli Daerah
2015	138	38.121.831.036	93,147	82.861.214.087,86
2016	213	45.108.112.180,50	53,050	94.783.154.638,45
2017	257	47.787.543.065,25	619,942	162.441.906.093,04
2018	274	4.441.482.532,78	40,850	105.656.762.964,31
2019	340	4.578.665.558,25	46,552	113.990.759.581,50
2020	285	4.567.098.356,63	20,902	133.349.332.852,44

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Utara 2021 Dinas Pariwisata Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, 2021

Pengujian dan Hasil Analisis Data Statistik Deskriptif

Dalam pengumpulan, pengelompokan dan pengolahan data yang akan menghasilkan ukuran statistik seperti frekwensi, pemusatan data, penyebaran data agar data lebih bermakna merupakan bagaian kegiatan dari statistik deskriptif oleh karena itu statistik deskriptif tersebut hanya memberikan gambaran umum tentang karektirstistik objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini adpaun karektistrstik dari objek yang diteliti sebagai berikut :

Tabel Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
THN	6	2015	2020	2017.50	1.871
JRM	6	138	340	251.17	69.072
RD	6	38121831036	4778754306525	1782268833396.17	2227419159450.422
JW	6	20902	619942	145740.50	233516.464
PAD	6	8286121408786	16244190609304	11551385503626.67	2869071358013.703
Valid N (listwise)	6				

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

1. Jumlah Rumah Makan / Restoran (X1) selama 6 Tahun

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa nilai minimum jumlah rumah makan/restoran/cafe dari seluruh data sampel adalah 138 Rumah makan/restoran/cafe pada tahun 2015. Jumlah nilai maksimum atau nilai data tertinggi jumlah rumah makan / restoran / café sebesar 340 pada tahun 2020. Nilai rata-rata (mean) jumlah rumah makan / restoran / café dari seluruh data sampel adalah sebesar 251.17. Nilai deviasi standar jumlah rumah makan / restoran / café sebesar 69.072.

2. Retribusi Daerah (X2) selama 6 Tahun

Tabel menunjukkan bahwa nilai minimum pendapatan Retribusi Daerah dari seluruh data sampel adalah 38121831036 pada tahun 2015. Jumlah nilai pendapatan maksimum atau nilai data tertinggi jumlah pendapatan Retribusi Daerah sebesar 47.78754306525 pada tahun 2020. Nilai rata-rata (mean) jumlah pendapatan Retribusi Daerah dari seluruh data sampel adalah sebesar 1782268833396.17. Nilai standar deviasi dari retribusi daerah sebesar 2227419159450.422.

3. Jumlah Wisatawan (X3) selama 6 Tahun

Tabel menunjukkan bahwa nilai minimum jumlah wisatawan dari seluruh data sampel adalah 20902 pada tahun 2015, dan jumlah wisatawan data maksimum atau nilai data tertinggi sebesar 619942 pada tahun 2020 dan Nilai rata-rata (mean) jumlah wisatawan dari seluruh

data sampel adalah sebesar 145740.50 Nilai standar deviasi dari jumlah wisatawan sebesar 233516.464

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) selama 6 Tahun

Tabel menunjukkan bahwa nilai minimum jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari seluruh data sampel adalah 8286121408786 pada tahun 2015, dan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) data maksimum atau nilai data tertinggi sebesar 16244190609304 pada tahun 2020 dan Nilai rata-rata (mean) jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari seluruh data sampel adalah sebesar 11551385503626.67. Nilai standar deviasi dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2869071358013.703

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menggunakan uji regresi berganda menggunakan uji Asumsi Klasik yang harus dipenuhi diantaranya adalah : Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas dan Uji Autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya variabel pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi (Ghozali, 2016: 154). Hasil pengujian menunjukkan data berdistribusi normal, jika *probability value* > 0,05. Hasil pengolahan data uji normalitas dengan *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (KS) sebagai berikut :

Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0001628
	Std. Deviation	.13960000
Most Extreme Differences	Absolute	.291
	Positive	.291
	Negative	-.152
Kolmogorov-Smirnov Z		.713
Asymp. Sig. (2-tailed)		.690

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas yang terlihat dari tabel nilai *probability value* sebesar 0,690. Hasil tersebut menunjukkan nilai *probability value* > 0,05 atau 0,690 > 0,05. Jadi, dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

4.3.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016: 103). Masalah multikolinieritas di deteksi dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance \geq 0,10 atau sama dengan nilai VIF \leq 10 (Ghozali, 2016: 103-104). Berikut hasil uji multikolinieritas:

Tabel Uji Multikolinieritas

t	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1.457	.282		
1.850	.206	.987	1.013
-.119	.916	.567	1.764
2.102	.170	.573	1.746

Sumber : data sekunder diolah, 2021

Dapat dianalisa bahwa dari tabel di atas menunjukkan hasil uji multikolinieritas sebagai berikut

<i>Variabel</i>	<i>Tolerance</i>	Vif	Keterangan
Jumlah Rumah Makan	.987	1.013	Bebas Multikolinieritas
Jumlah Wisatawan	.567	1.768	Bebas Multikolinieritas
Retribusi Daerah	.573	1.746	Bebas Multikolinieritas

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai vif lebih kecil dari 10, maka

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016: 134). masalah heteroskedastisitas dapat diketahui dengan uji *statistic glejser*, hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel Uji heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	29243522244999.387	39836615073982.650		.734	.597
1 THN	-14530017797.845	19798482691.865	-1.074	-.734	.597
JRM	442728129.489	506432464.969	1.208	.874	.543
RD	-.009	.010	-.776	-.901	.533
JW	-11494.356	85593.457	-.106	-.134	.915

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : data sekunder diolah, 2021

Dapat dianalisa dari tabel diatas sebagai berikut :
bahwa hasil uji heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Jumlah Rumah Makan (JRM)	.543	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Retribusi Daerah (RD)	.533	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Jumlah Wisatawan (JW)	.915	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Dari tabel menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak signifikan pada 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai signifikansi Jumlah Rumah Makan untuk uji heteroskedastisitas sebesar 0,059. Nilai signifikansi diketahui lebih besar dari 0,05 atau $0,543 > 0,05$. Dapat dikatakan bahwa hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel Jumlah Rumah Makan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Nilai signifikansi Jumlah Retribusi

Daerah pada uji heteroskedastisitas sebesar 0,533. Nilai signifikansi diketahui lebih besar dari 0,05 atau $0,533 > 0,05$. Dapat dikatakan bahwa hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel Jumlah Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- Nilai signifikansi Jumlah Wisatawan pada uji heteroskedastisitas sebesar 0,915. Nilai signifikansi diketahui lebih besar dari 0,05 atau $0,915 > 0,05$. Dapat dikatakan bahwa hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel

Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi korelasi,

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW). Hasil pengujian ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.959 ^a	.920	.801	.10753	2.276

a. Predictors: (Constant), LN_{x3}, LN_{x2}, LN_{x1}

b. Dependent Variable: Lny

Sumber : data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut nilai uji DW sebesar 2.276 dibandingkan dengan nilai tabel dengan derajat kepercayaan. Jadi, dapat diketahui nilai DW sebesar 2.276 lebih besar dari batas atas (dU) 1.689 atau nilai DW terletak diantara batas atas dU dan (4-dU), yaitu 1.689 < 2.276, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dan data dapat diuji lebih lanjut.

Uji Ketepatan Model

Uji F

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F hanya digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah tepat. Kriteria pengujianya, apabila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikan (0,05), maka model yang digunakan sudah tepat.

Tabel ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	18103942723785470000 0000000.000	3	60346475745951 5700000000000.00 0	8.581	.032 ^b
1 Residual	28130033629580387000 000000.000	4	70325084073950 97000000000.000		
Total	20916946086743510000 0000000.000	7			

a. Dependent Variable: PENDAPATANASLIDAERAH

b. Predictors: (Constant), JUMLAH WISATAWAN, JLH RUMAH MAKAN, RETRIBUSIDAERAH

Sumber : data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa hasil uji signifikan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Uji anova diketahui nilai F sebesar 8.581 dan nilai signifikan sebesar 0,032 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata, dan retribusi obyek wisata secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Semakin

nilai R2 mendekati satu maka variabel variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.915 ^a	.837	.593	1830226703229.319

a. Predictors: (Constant), JUMLAHWISATAWAN, JLHRUMAHMAKAN, RETRIBUSIDAERAH
 Sumber : data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi adalah 0,593 Hal ini menjelaskan bahwa variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan, jumlah rumah makan, Retribusi daerah secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 59,3 %.

Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis

regresi berganda, karena menggunakan lebih dari dua variabel. Analisis regresi berganda bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan, jumlah rumah makan, Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan sebagai berikut:

Tabel Unstandardized Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	1692625968135.926	2377033263473.284	
JLHRUMAHMAKAN	43731287736.029	10550889410.944	.795
RETRIBUSIDAERAH	.335	.664	.126
JUMLAHWISATAWAN	8063809.975	6629596.919	.293

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021

$$Y = a - X_1 + X_2 - X_3 + X_4 + e$$

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = 1.693 + 4.374 (x_1) + 335 (x_2) + 8.064 (x_3) + \epsilon$$

Berdasarkan masing-masing nilai koefisien dalam persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 1.693 menyatakan bahwa jika nilai variabel independen dianggap nol (X1=0, X2=0, X3=0, dan X4=0) maka pendapatan Asli daerah di Tapanuli Utara sebesar 1.693.
- b. Koefisien regresi variabel Jumlah

Rumah Makan/Restoran/Cafe sebesar 4.374 artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Jumlah Rumah Makan/Restoran/Cafe sebesar 1% akan menaikkan Pendapatan Asli daerah sebesar 4.374%.

- c. Koefisien regresi variabel Retribusi Daerah sebesar 335 artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Retribusi Daerah 1% akan menaikkan Pendapatan

Asli Daerah sebesar 335 %
 d. Koefisien regresi variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 8,064 artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan 1% akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,064%.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji nilai t bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel di dalam penelitian seperti yang dinyatakan dalam hipotesis yang dipakai dalam penelitian ini, berikut adalah hasil uji nilai t :

Tabel Hasil uji nilai t dengan SPSS
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1692625968135.926	2377033263473.284		-.712	.516
1 JLHRUMAHMAKAN	43731287736.029	10550889410.944	.795	4.145	.014
RETRIBUSIDAERAH	.335	.664	.126	.504	.041
JUMLAHWISATAWAN	8063809.975	6629596.919	.293	1.216	.031

a. Dependent Variable: PENDAPATANASLIDAERAH
 Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021

Beraskan tabel dapat dianalisa bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut :

1. Pengaruh Jumlah Rumah Makan/Restoran/Café terhadap Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan hasil uji statistik t, diperoleh nilai t hitung sebesar 4,145 dan nilai signifikan sebesar 0,014 lebih kecil dari nilai signifikan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05 (5%), nilai signifikan kurang dari 0,05 (0,014 < 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan Jumlah Rumah Makan/Restoran /Café berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan hasil uji statistik t, diperoleh nilai t hitung sebesar 504 dan nilai signifikan sebesar 0,041 lebih kecil dari nilai tarif signifikan 0,05 (5%),

nilai signifikan kurang dari 0,05 (0,041 < 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan hasil uji statistik t, diperoleh nilai t hitung sebesar 1,216 dan nilai signifikan sebesar 0,031 lebih kecil dari nilai tarif signifikan 0,05 (5%), nilai signifikan kurang dari 0,05 (0,031 < 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pembahasan

1. Jumlah Rumah Makan/Restoran/Cafe Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah rumah makan/restoran/cape berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, yang ditunjukkan

dengan hasil uji t variabel jumlah rumah makan/restoran/cafe sebesar 4,145 dan nilai signifikan sebesar 0,014 lebih kecil dari nilai signifikan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05 (5%) sehingga H_1 diterima artinya jumlah rumah makan/restoran/cafe berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sama sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Naning Widyawanti (2017) yang menyatakan bahwa variabel jumlah rumah makan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah. Dan juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigit Sanjaya, Ronni Andri Wijaya (2020) yang menghasilkan variabel jumlah rumah makan / restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Berpengaruhnya jumlah rumah makan/restoran/cafe terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dapat berasal dari penerimaan pajak yang setorkan oleh rumah makan/restoran maupun café yang bersada di Tapanuli Utara. Dengan demikian, usaha-usaha yang terdapat di Tapanuli Utara dapat berkembang dan dibina oleh pemerintahan setempat sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel jumlah obyek wisata sebesar 504 dan nilai signifikan sebesar 0,041 lebih kecil dari nilai tarif signifikan 0,05 (5%) sehingga H_2 diterima artinya retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi daerah menjadi salah satu komponen dari penerimaan Pemerintah Daerah Tapanuli Utara, karena memberikan kontribusi yang besar dan merupakan sub sektor penerimaan daerah yang potensial untuk

dikembangkan. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian I Putu Agus Sudarmana, Gede Mertha Sudiarta, 2020 yang menyatakan bahwa Retribusi daerah, dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung. Menurut UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 tahun 1997 bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi daerah terbukti memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel retribusi obyek wisata sebesar 1,216 dan nilai signifikan sebesar 0,031 lebih kecil dari nilai tarif signifikan 0,05 (5%) sehingga H_3 diterima artinya Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sama sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rian Syahputra, 2018, yang menyatakan bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan memiliki pengaruh terhadap PAD. Dengan demikian Retribusi daerah akan memberikan kontribusi dalam usaha peningkatan PAD suatu daerah. Selain itu, penelitian ini juga sejalandengan penelitian yang dilakukan oleh Sedana Putra (2011), yang meneliti tentang pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan retribusi obyek wisata, pendapatan asli daerah dan anggaran pembangunan kabupaten Gianyar tahun 1991-2010, yang menyatakan bahwa

Penerimaan retribusi obyek wisata memiliki pengaruh signifikan terhadap anggaran pembangunan daerah.

PENUTUP

Setelah menganalisa dari data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Jumlah rumah makan/restoran/café berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diperoleh nilai t hitung sebesar 4,145 dan nilai signifikansi sebesar 0,014 maka variabel ini berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan nilai koefisien menunjukan angka sebesar 4.374 artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Jumlah rumah makan/restoran/café sebesar 1% akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 4.374%.
2. Jumlah retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) nilai t hitung sebesar 504 dan nilai signifikansi sebesar 0,041 maka variabel ini berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan koefisien regresi variabel Restribusi Daerah sebesar 335 artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Retribusi Daerah 1 % akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 335 %.
3. Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) nilai t hitung sebesar 1,216 dan nilai signifikansi sebesar 0,031 maka variabel ini berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan koefisien regresi variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar

8,064 artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan 1 % akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 8,064 %.

4. Berdasarkan hasil analisis simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel jumlah rumah makan/restoran/café, jumlah retribusi daerah dan jumlah kunjungan wisatawan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Berdasarkan koefisien determinasi (Adjusted R Square) menunjukkan besarnya kontribusi atau pengaruh dari variabel jumlah rumah makan/restoran/café, jumlah retribusi daerah dan jumlah kunjungan wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 0,593 atau 59,3 % sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel independen lain diluar penelitian ini.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebaiknya melakukan pelatihan terhadap pengelola rumah makan/restoran/café baik dalam bidang penyetoran pajak, pelayanan prima, sehingga diharapkan dapat tertib adminisrasi bagi pelaku pengelola rumah makan tersebut.
2. Pengelolaan sumber pendapatan dari retribusi daerah seperti pajak dan retribusi daerah perlu diidentifikasi secara tepat, serta pengawasan yang belum efektif oleh pemerintah sehingga dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat maksimal, untuk Badan Usaha Milik Daerah, Pelaku Wisata perlu ditingkatkan agar pengelolaan manajemen dan pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara terbuka, sehingga dapat memberikan kontribusi

yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah.

3. Dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, baik dilakukan dengan retribusi tiket, parkir, dll, selain pemerintahan kab. Taput dapat menambah jumlah obyek wisata juga sebaiknya dilakukan sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang sudah pasti berdampak dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tapanuli Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2006) . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Gambaran Umum Administrasi Kabupaten Gunung Kidul*, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis multivariete dengan program IBM. SPSS 21*. Semarang : UNDIP.
- Hidayat, Wahyu. ((2011). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Wisata di Taman Nasional Way Kambas Propinsi Lampung”. Tesis. Universitas Indonesia
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2011). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen edisi pertama*. Yogyakarta : BPFE.
- Latan, Hengky dan Selva Temalagi. (2008). *Analisis multivariete teknik dan aplikasi menggunakan program IBM SPSS*. Yogyakarta : BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Munawir, S. (1997) . *Perpajakan*. edisi kelima cetakan kedua. Yogyakarta : Liberty.
- Mursid. (2003). *Manajemen Pemasaran*. Edisi 1. Penerbit Bumi Aksara Jakarta Bekerja Sama Dengan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UI, Jakarta.
- Nasution. (2009). *Pemerintah Daerah dan Sumber-sumber Pendapatan Asli daerah*. Jakarta: PT. SOFMEDIA.
- Nawawi, Hadari. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Novi, Dwi Purwanti dan Retno, Mustika Dewi. (2014). *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Hal 4
- Pertiwi. (2014). *Pengaruh kunjungan wisatawan, retribusi obyek wisata dan phr terhadap PAD kabupaten Gianyar*. E-Jurnal EP Unud, Vol.3, No. 3.
- Syaputra Rian, (2018), *Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Retribusi Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2012 - 2016*
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Windriyaningrum, L. A. (2013). *Pengaruh Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan, Dan Jumlah Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus Tahun 1981-2011*. Semarang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Medan atas bantuan dan dukungannya sehingga publikasi hasil penelitian ini dapat diterbitkan.